

**BADAN KELUARGA BERENCANA  
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT – KOTA MALANG**

**SISTEM PEMILU LEGISLATIVE  
DAN KETERWAKILAN PEREMPUAN**

**MEMBANGUN SINERGI DAN STRATEGI**

**Prof. M. Mas'ud Said, PhD**  
**(Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia - MIPI)**

# Mengapa Harus Pemilu ?

- Meneguhkan demokrasi, syarat bagi keberlangsungan sistem kebangsaan, menjadi sarana tertinggi bagi pencapaian tujuan bangsa: pembangunan, keadilan dan kesejahteraan
- Pemilu sudah merupakan kesepakatan bangsa, termaktub dalam perundangan, untuk estafet kepemimpinan negara, pemilihan perwakilan rakyat yang lebih baik
- POINT OF NO RETURN = TIDAK ADA TAWAR MENAWAR, TAK MUNGKIN LAGI BALIK KE JAMAN DAHULU....

# WAJAH PEMILU 2009

(Sumber: KPU Pusat, KPU Jatim, Media Massa)

- DIKUTI 38 PARTAI POLITIK LAMA DAN BARU, FRIKSI-FRIKSI
- DIKUTI 15.000 CALEG DPR DI INDONESIA
- BERSAING 1.600 CALEG DI DPRD PROP JATIM
- AKAN BERADU KEKUATAN 630 CALEG DI KABUPATEN MALANG
- SALING MEMBUAT MANUVER 425 CALEG DI KOTA BATU
- MATI MATIAN USAHA 792 CALEG DI KOTA MALANG
- 61% CALEG DENGAN STATUS PEKERJAAN KURANG JELAS  
( Menurut Harian Surya 30 Januari)
- TAHUN 2010 AKAN BERLANJUT LAGI 287 PILKADA DI INDONESIA

# Data Keterwakilan Perempuan

- Prosentase Keterwakilan Perempuan di Parlemen untuk kawasan Dunia rata rata 14, 3% (International Idea, 2002, Laporan Bank Dunia, 2003)
- Prosentase Keterwakilan Perempuan di Parlemen untuk kawasan Skandinavia (Swedia, Norwegia dan Denmark) sebesar 40 % (International Idea, 2002, Andayani, 2007)
- Prosentase Keterwakilan Perempuan di Parlemen untuk kawasan Asia Tenggara sebesar 12, 7% (International Idea; 2002, Andayani; 2007).
- Prosentase Keterwakilan Perempuan di Parlemen untuk kawasan dunia ARAB sebesar 4,67% (International Idea;2002, Andayani 2007)

# Ternyata: Keterwakilan di Indonesia

- Prosentase Keterwakilan Perempuan di Parlemen untuk INDONESIA SEBESAR 11,5% (Wahidah Z. Siregar, 2005)
- Prosentase Keterwakilan Perempuan di Parlemen untuk JAWA TIMUR SEBESAR 16% (Wahidah Z. Siregar, 2005)
- Prosentase Keterwakilan Perempuan di Parlemen untuk JAWA TENGAH SEBESAR 15% (Laporan DPRD Jateng 2006)

# ENAM PENYEBAB UTAMA

(International Institute of Democracy and Electoral Assistance, 2003)

- RENDAHNYA TINGKAT PENDIDIKAN PEREMPUAN
- RENDAHNYA DUKUNGAN PARTAI POLITIK
- KURANG KERJASAMA PEREMPUAN DALAM PARLEMEN DENGAN LUAR PARLEMEN
- NORMA SOSIAL YG BERORIENTASI pada LAKI LAKI
- KURANGNYA DUKUNGAN MEDIA
- SISTEM PEMILU DAN KURANGNYA KUOTA PEREMPUAN

# Mengapa Harus ada Keterwakilan

- DIANGGAP DUNIA INI KURANG ADIL, BIAS GENDER
- DIANGGAP SEBAGAI BAGIAN DAN SYARAT DEMOKRATISASI
- MENJADIKAN DUNIA MENJADI LEBIH MANUSIAWI
- MEMBERI RUANG LEBIH LUAS BAGI KEHALUSAN BUDI DAN PERASAAN
- WORLD DIGNITY – HALUS PERASAAN, SANTUN BELUM ADA DPR PEREMPUAN DIPANGGIL KPK

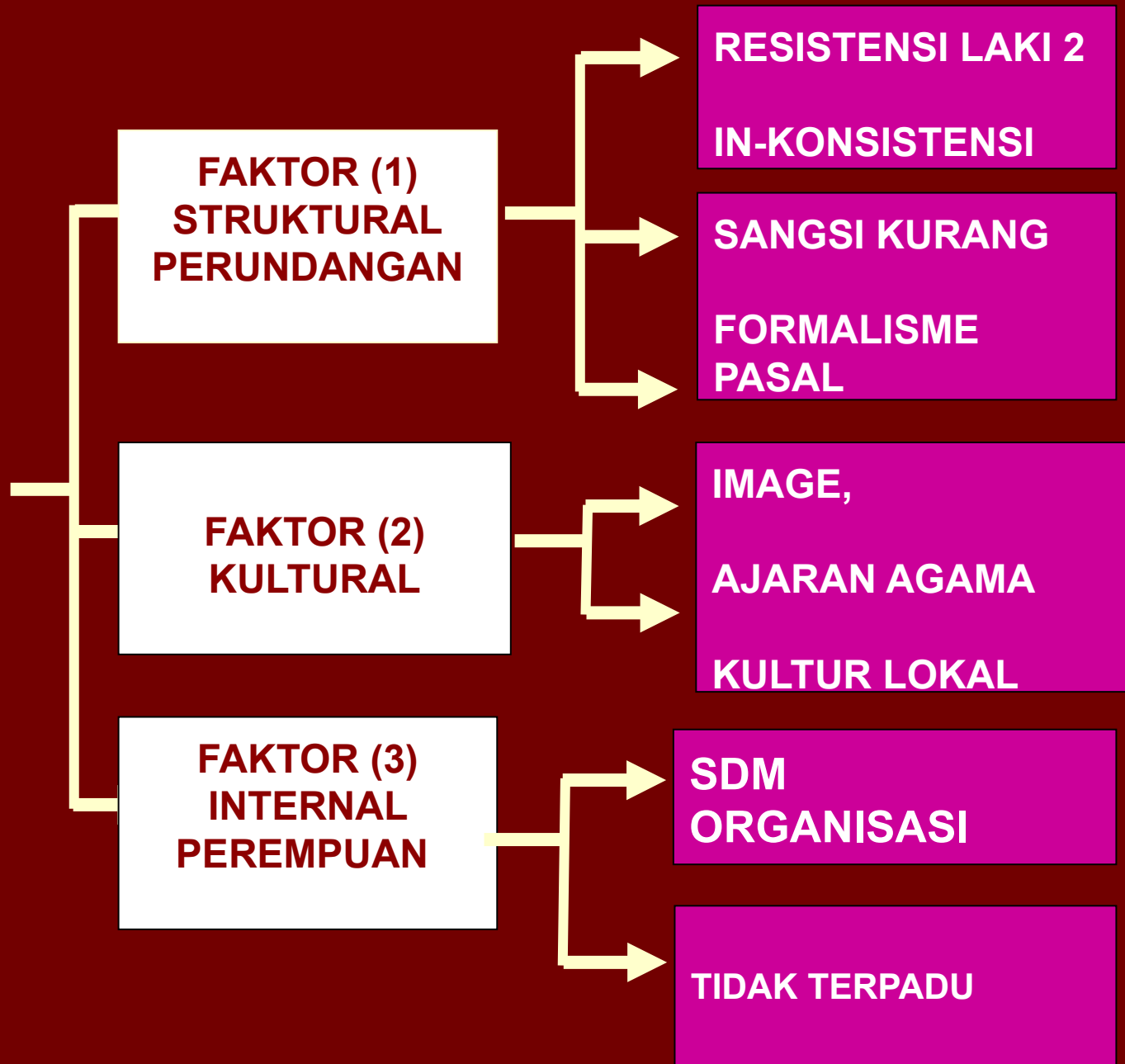
# KESUNGGUHAN PARPOL

## (RUMUSAN ATAU USULAN PARTAI)

- (F-PAN): “HARUS MENGUPAYAKAN DENGAN SUNGGUH SUNGGUH PALING SEDIKIT 35%”
- (FKB): “MEMPERHATIKAN KETERWAKILAN BALON PEREMPUAN PALING SEDIKIT 30%”
- (FPG): “HARUS MEMUAT KETERWAKILAN PEREMPUAN PALING SEDIKIT 30% PADA AKULULASI DAFTAR CALON DI SETIAP PROPINSI”
- (PDIP dan LAIN LAIN): “HARUS MEMPERHATIKAN KETERWAKILAN PEREMPUAN PALING SEDIKIT 30%”



# PEMETAAN MASALAH



# KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM HIMPITAN MASALAH PEMILU

- **PARLIAMENTARY THRESHOLD**
- **KETERWAKILIAN PEREMPUAN**

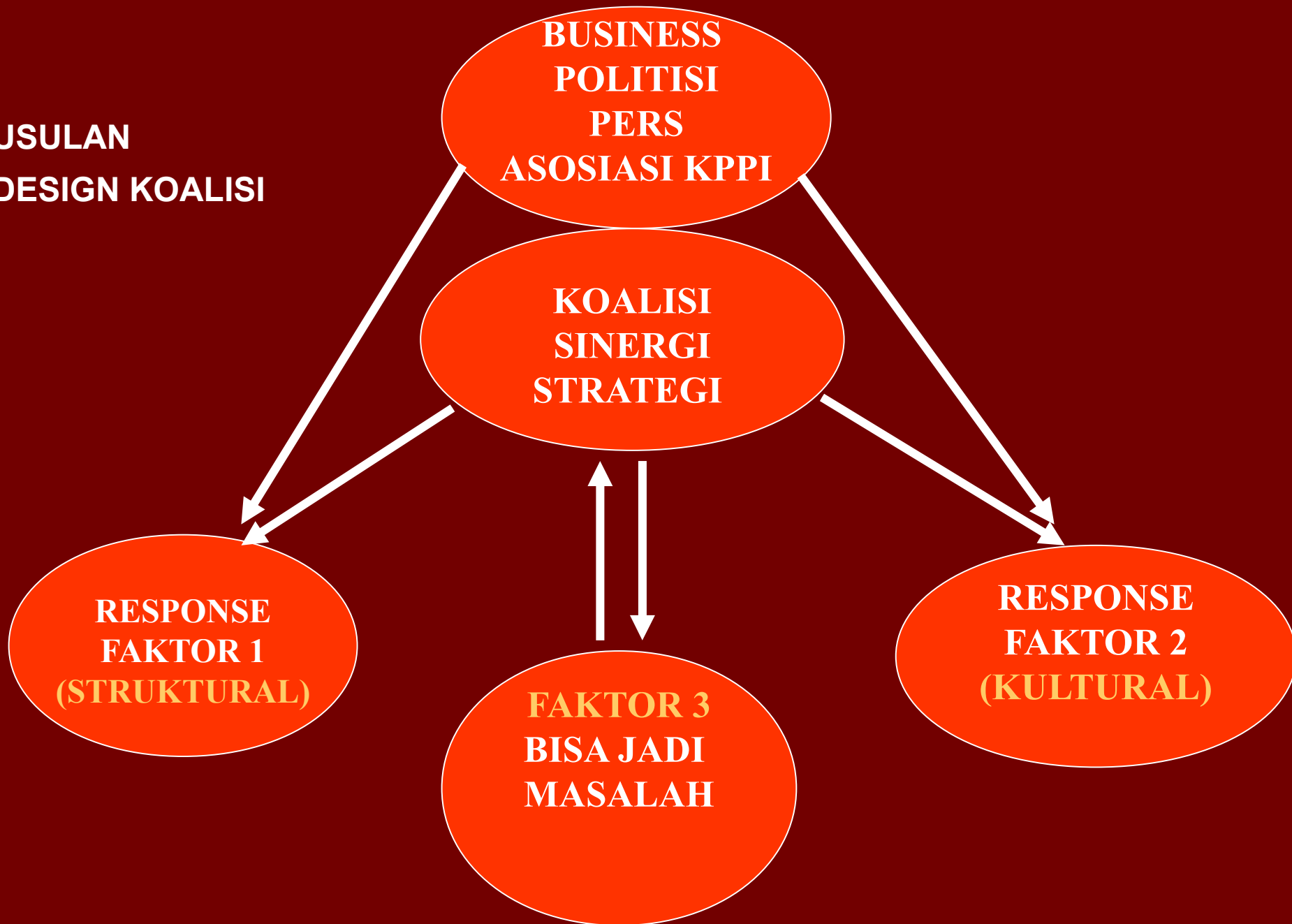
- **JUMLAH ANGGOTA DPR –DPRD**
- **PENENTUAN CALON TERPILIH**

**KOALISI  
SINERGI  
STRATEGI  
PEREMPUAN**

- **PENYERDEHANAAN KAMPANYE**
- **DANA PEMILU 2009**

- **DAERAH PEMILIHAN**
- **JUMLAH KURSI DP**
- **HAK PILIH TNI POLRI**

**USULAN  
DESIGN KOALISI**



# TIGA TINGKATAN WILAYAH PERJUANGAN PRAKTIS



# Masalah Bidang Regulasi

- HARUS ADA PERATURAN PEMERINTAH YANG MENDUKUNG DILAKSANAKANNYA PASAL 65 UU PEMILU
- HARUS ADA SANGSI FORMAL BAGI KETUA PARPOL YANG MANGKIR
- TAHUN INI, KETERWAKILAN HARUS DIPAKSAKAN MINIMAL PADA LEVEL DPR RI
- PADA LEVEL PROPINSI HARUS MINIMAL 20 -30%
- PADA LEVEL KOTA DAN KABUPATEN MINIMAL 15-30%

# Dalam Kenyataan di Indonesia

(Investigasi M.Mas'ud Said)

- KALAU TERBUKA, JUGA SULIT KARENA UNTUK MENCAPAI BILANGAN PEMBAGI PEMILIH (BPP) 25%, PEREMPUAN SULIT SEKALI MENCAPAI
- KALAU SISTEM SELEKSI TERTUTUP, JUGA AKAN SULIT KARENA LAKI LAKI LEBIH BANTER, LEBIH BERANI DAN MUNGKIN LEBIH SIAP MENYEROBOT
- BEBERAPA PARTAI BESAR KURANG SREG DENGAN PROPORSI 30% DARI SEGI LEVEL DAN WAKTU, MEREKA MINTA DIUNDUR DAN DI RANGKING

# USULAN PERTAMA UNTUK GERAK CEPAT SUKSES

- SEKARANG LEBIH FOKUS PADA RESPONSE STRUKTURAL (PERUNDANGAN DAN PP ) DARIPADA UNIT KULTURAL DAN MASALAH INTERNAL
- DIKUATKAN DENGAN GERAKAN DAN KERJASAMA PIHAK LUAR YANG SELAMA INI MENJADI KENDALA
- PENGUATAN ISSUE SECARA NASIONAL DAN INTERNASIONAL DARI PADA BERFOKUS PADA OPERATING CORE
- PERUBAHAN VOLUME, MEREKA YANG BERPENGALAMAN DAN MEREKA YANG BERKEMAMPUAN DIDUKUNG KADER MUDA

# PEMETAAN PENGISIAN JABATAN STRUKTURAL

DPRD

KEPALA DAERAH

JABATAN POLITIS

JABATAN KARIR

TECHNO STRUCTURE

MIDDLE LINE

SUPPORT STAFF

BAPPEDA

SEKDA

PERSONIL

KEUANGAN

UMUM

OPERATING CORE

DINAS-DINAS

PELAYANAN  
DASAR

SEKTOR  
UNGGULAN



# BAYANGAN SUKSES SINERGI



# Usulan awal

- PRIORITAS KEPADA PERJUANGAN ISUE DAN PERUNDANGAN daripada MENGANDALKAN “MENUNGGU SITUASI LEBIH BAIK DAN PROTES FISIK”
- PRIORITAS ke LEVEL NASIONAL dan SINERGI DG PIHAK LUAR DARIPADA “LOKAL DAN EKSKLUSIF”
- PRIORITAS ke PENGEMBANGAN HASIL daripada ke CARA KONVENSIONAL YG LAMBAN